

# Problematika dan Rekonstruksi Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

*The Problematics and Policy Reconstruction of Islamic Religious Education Learning*

**Mutia Rahmah, Khairunnisa\*, Aisyah Maulidia, Nuryadin**

UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

\* [khairunnisa200703@gmail.com](mailto:khairunnisa200703@gmail.com) (Primary Contact)

---

## ABSTRACT

---

This study aims to analyze the problems underlying Islamic Religious Education (IRE) learning policies and formulate a reconstruction framework from the perspective of Islamic Education Management. Despite its strategic role in character development, IRE continues to face challenges related to curriculum rigidity, limited teacher professionalism, digital transformation, and policy implementation. This study employed a qualitative library research approach through literature review and policy document analysis. Data were collected from fifteen relevant academic sources, including journal articles, books, and educational policy documents published between 2019 and 2026. The findings reveal that the implementation of IRE learning policies is constrained by four major managerial weaknesses: inadequate human resources, limited digital adaptation, weak stakeholder collaboration, and the absence of systematic strategic planning. To address these issues, the study proposes a policy reconstruction framework based on four principles of Islamic Education Management: *itqan* (professionalism), *syura* (consultation), *taghyir* (adaptive change), and *tashwir* (strategic planning). The framework integrates Islamic values with contemporary managerial functions to support more effective and sustainable policy implementation. The study recommends the development of flexible, technology-oriented, and collaborative IRE policies to improve the quality and relevance of Islamic education in the contemporary era.

### Keywords

Learning Policy,  
Islamic Religious  
Education, Islamic  
Education  
Management, Policy  
Reconstruction,  
Managerial Framework

### Article History

Received: 2026-06-03

Accepted: 2026-06-18

---

Copyright © 2026, Rahmah et al.  
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru  
DOI: [10.56113/takuana.v5i1.544](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i1.544)

---

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan bagian strategis dalam sistem pendidikan nasional karena tidak hanya berfungsi mentransmisikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan orientasi spiritual peserta didik. Namun, perkembangan sosial, digitalisasi, serta perubahan kebijakan pendidikan nasional telah menimbulkan problematika baru dalam implementasi kebijakan pembelajaran PAI,

terutama terkait kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan praktik manajerial di satuan pendidikan (Zed, 2008).

Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa problematika kebijakan PAI dapat dipetakan ke dalam tiga klaster utama. Klaster pertama adalah studi yang berfokus pada analisis problematika kebijakan PAI secara struktural dan regulatif. Salamun dan Sauri (2023) menunjukkan bahwa kebijakan PAI di Indonesia masih menghadapi persoalan struktural meliputi lemahnya koordinasi implementasi antar lembaga, kesenjangan pemerataan mutu pembelajaran, serta belum optimalnya sistem evaluasi kebijakan dalam mendukung internalisasi nilai-nilai Islam. Sejalan dengan itu, Yulia, Munir, dan Nurlaila (2025) menemukan bahwa problematika pendidikan Islam kontemporer mencakup ketimpangan akses pendidikan, rendahnya kualitas pembelajaran, pergeseran moral peserta didik, dan ketidaksiapan kelembagaan menghadapi digitalisasi. Klaster kedua adalah studi yang memusatkan perhatian pada strategi peningkatan mutu pembelajaran PAI secara praktis. Muhammad dkk. (2022) menegaskan bahwa peningkatan mutu pembelajaran PAI memerlukan strategi manajemen yang mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara sistemik antara guru, kepala sekolah, dan kebijakan institusional. Ihsan dkk. (2025) menambahkan bahwa kelemahan pelaksanaan pembelajaran PAI berpusat pada aspek kompetensi guru, sarana prasarana, dan metode pembelajaran yang belum adaptif. Klaster ketiga adalah studi yang membahas transformasi digital dan rekonstruksi kurikulum PAI. Apriyani dkk. (2025) menganalisis tantangan manajemen guru PAI dalam menghadapi transformasi digital, sementara Arifin dkk. (2026) menelaah rekonstruksi kurikulum berbasis nilai sebagai respons terhadap krisis humanisme dalam pendidikan modern.

Meskipun demikian, analisis komparatif terhadap ketiga klaster tersebut mengungkap celah penelitian yang signifikan. Studi klaster pertama kuat dalam deskripsi regulatif tetapi lemah dalam menawarkan model konseptual alternatif. Studi klaster kedua kaya praktis tetapi tidak mengaitkan strategi pembelajaran dengan kerangka manajemen pendidikan Islam secara sistemik. Adapun studi klaster ketiga berfokus pada aspek kurikuler dan teknologis, namun belum mengelaborasi bagaimana fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dapat dijadikan kerangka rekonstruksi kebijakan PAI. Dengan demikian, penelitian yang secara khusus mengintegrasikan analisis kebijakan pembelajaran PAI dengan perspektif manajemen pendidikan Islam dan menawarkan model rekonstruksi yang bersifat komprehensif dan sistemik masih sangat terbatas.

Keunikan penelitian ini terletak pada integrasi analisis kebijakan pembelajaran PAI dengan perspektif manajemen pendidikan Islam, yang memandang kebijakan bukan sekadar dokumen normatif, melainkan instrumen pengelolaan pendidikan yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas pembelajaran. Novelty penelitian ini adalah pengembangan model rekonstruksi kebijakan pembelajaran PAI berbasis empat prinsip manajemen pendidikan Islam *itqan* (profesionalitas), *syura* (musyawarah), *taghyir* (adaptasi perubahan), dan *tashwir* (perencanaan strategis) yang secara konseptual berbeda dari model manajemen pendidikan sebelumnya karena mengintegrasikan nilai normatif Islam dengan kebutuhan inovasi pembelajaran era digital dalam satu kerangka sistemik. Model ini menawarkan pendekatan konseptual yang memadukan fungsi-fungsi manajerial Islam dengan tuntutan kontemporer pembelajaran PAI (Sutrisno & Arifi, 2025). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika kebijakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam serta merumuskan model rekonstruksi

kebijakan yang relevan dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, sehingga dapat menjadi kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan pembelajaran PAI yang adaptif, integratif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan Islam.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menempatkan sumber-sumber pustaka sebagai data utama dalam proses analisis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji problematika dan rekonstruksi kebijakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui telaah terhadap hasil penelitian terdahulu, teori, dan dokumen akademik yang relevan. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti menelaah konsep, argumentasi, dan temuan yang telah berkembang, kemudian menyusunnya menjadi sintesis ilmiah baru sesuai fokus kajian (Zed, 2008; Moleong & Surjaman, 2014).

Sumber data penelitian terdiri atas artikel jurnal ilmiah terindeks SINTA dan Scopus, buku akademik, serta dokumen kebijakan pendidikan nasional yang relevan dengan pembelajaran PAI dan manajemen pendidikan Islam. Proses seleksi sumber dilakukan secara *purposive* berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan secara eksplisit. Kriteria inklusi meliputi: (1) kesesuaian topik dengan problematika kebijakan pembelajaran PAI atau manajemen pendidikan Islam; (2) periode publikasi tahun 2019–2026 untuk memastikan relevansi kontemporer, kecuali untuk referensi teoritis klasik yang tetap relevan secara substantif; (3) status publikasi pada jurnal terindeks SINTA (S1–S4) atau Scopus, atau diterbitkan oleh penerbit akademik bereputasi; dan (4) tersedia dalam bentuk teks lengkap yang dapat diakses dan diverifikasi. Adapun kriteria eksklusi mencakup: (1) publikasi tidak melalui proses peer review; (2) sumber tanpa kejelasan identitas penulis; (3) dokumen yang tidak membahas secara substantif kebijakan PAI atau manajemen pendidikan Islam; dan (4) artikel yang telah diretraksi atau diragukan kualitasnya. Berdasarkan kriteria tersebut, terpilih lima belas sumber primer yang terdiri atas sembilan artikel jurnal, empat buku akademik, dan dua dokumen kebijakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis isi (*content analysis*) terhadap sumber-sumber yang telah terseleksi. Prosedur analisis mengikuti alur: (1) identifikasi tema dan argumen utama dari masing-masing sumber; (2) kategorisasi temuan ke dalam klaster problematika dan klaster rekonstruksi; (3) analisis komparatif antar sumber untuk menemukan pola, perbedaan, dan celah penelitian; serta (4) sintesis konseptual untuk merumuskan model rekonstruksi kebijakan PAI berbasis manajemen pendidikan Islam. Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari minimal dua referensi berbeda untuk setiap klaim konseptual utama (Sujanto et al., 2023).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Problematika Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Problematika kebijakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada era modern menunjukkan adanya tantangan yang semakin kompleks, terutama berkaitan dengan transformasi kurikulum, digitalisasi pembelajaran, globalisasi, serta krisis nilai dalam pendidikan. Berdasarkan hasil kajian kepustakaan, ditemukan bahwa kebijakan

pembelajaran PAI belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan peserta didik di era revolusi industri dan masyarakat digital (Apriyani et al., 2025; Pujianti et al., 2025). Permasalahan ini bersifat multidimensi dan dapat diidentifikasi dalam lima dimensi utama sebagai berikut.

Pertama, rendahnya efektivitas metode pembelajaran PAI. Hanafi dkk. (2021) dan Ihsan dkk. (2025) secara konsisten menunjukkan bahwa pembelajaran PAI masih cenderung bersifat monoton dan didominasi metode ceramah tradisional, sehingga peserta didik khususnya di perguruan tinggi sering menganggap mata kuliah PAI sebagai pelajaran yang kurang relevan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya motivasi belajar, terutama dalam pembelajaran Al-Qur'an dan pembentukan karakter religius. Hanafi dkk. (2021) menegaskan bahwa metode pembelajaran yang tidak inovatif juga berkontribusi pada munculnya persepsi bahwa PAI tertinggal dari sisi teknologi dan tidak mampu merespons tantangan globalisasi. Hubungan antara kelemahan metode ini dengan kebijakan pendidikan sangat erat: ketidakmampuan pemegang kebijakan di tingkat satuan pendidikan untuk mendorong inovasi pedagogis merupakan cermin dari lemahnya kebijakan pengembangan profesionalisme guru secara kelembagaan.

Kedua, hambatan implementasi kebijakan digitalisasi pembelajaran. Kebijakan pembelajaran daring memang menjadi solusi alternatif di era pandemi dan pasca pandemi, tetapi implementasinya menghadirkan hambatan struktural berupa keterbatasan interaksi spiritual, lemahnya kontrol pembinaan akhlak, dan ketidaksesuaian model pembelajaran dengan karakteristik peserta didik (Arifin et al., 2026; Azhari & Aurannisa, 2026). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PAI daring lebih berorientasi pada transfer materi kognitif daripada internalisasi nilai dan pembentukan karakter sebuah tantangan yang belum diatasi secara memadai oleh kebijakan pendidikan yang ada. Koswara dan Wigati (2026) menambahkan bahwa transformasi digital dalam PAI membuka peluang besar, namun mensyaratkan perubahan kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur, kompetensi digital guru, serta model asesmen yang mampu menangkap capaian afektif peserta didik.

Ketiga, tantangan globalisasi dan revolusi industri 4.0 terhadap kurikulum PAI. Pujianti dkk. (2025) menjelaskan bahwa kurikulum PAI masih terjebak pada pola normatif dan tekstualis sehingga kurang responsif terhadap dinamika global yang menuntut kompetensi abad ke-21 seperti literasi digital, berpikir kritis, kemampuan kolaborasi, dan moderasi beragama. Sutrisno dan Arifi (2025) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa dinamika kebijakan pendidikan agama sejak era reformasi masih menyisakan ketegangan antara orientasi normatif-keagamaan dan kebutuhan adaptasi terhadap perubahan sosial-global. Dalam konteks ini, kebijakan kurikulum PAI perlu direkonstruksi agar mampu mengharmonisasikan tradisi keilmuan Islam dengan tuntutan globalisasi tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental (Nurhasanah, 2021).

Keempat, krisis moral dan ancaman radikalisme. Hanafi dkk. (2021) menjelaskan bahwa rendahnya pemahaman moderasi beragama dan kecenderungan eksklusivisme dapat memunculkan benih-benih radikalisme di lingkungan pendidikan. Oktafiani dan Muhtarom (2022) menambahkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kepribadian siswa pasca pandemi merupakan tantangan tersendiri yang memerlukan pendekatan pembelajaran PAI yang lebih humanis dan kontekstual. Oleh sebab itu, kebijakan pembelajaran PAI tidak cukup hanya menekankan aspek kognitif, tetapi harus memperkuat nilai toleransi, moderasi, dan wawasan kebangsaan.

Kelima, ketidakseimbangan antara orientasi akademik dan dimensi humanistik. Arifin dkk. (2026) menjelaskan bahwa pendidikan modern cenderung menekankan aspek rasional-instrumental sehingga mengabaikan pembentukan karakter, spiritualitas, dan nilai kemanusiaan. Munawaroh dan Muhaimin (2019) menambahkan bahwa korelasi antara perencanaan pembelajaran dan hasil belajar menunjukkan bahwa tanpa perencanaan yang berorientasi pada dimensi humanistik, pembelajaran PAI berisiko kehilangan fungsi transformasionalnya. Akibatnya, kebijakan pembelajaran PAI perlu diarahkan pada pendekatan humanistik berbasis nilai yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan konatif secara seimbang.

Berdasarkan analisis kelima dimensi problematika tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan kebijakan pembelajaran PAI bersifat saling terkait: kelemahan metode pembelajaran diperparah oleh absennya kebijakan pengembangan profesionalisme guru; tantangan digitalisasi diperburuk oleh lemahnya kebijakan transformasi digital; dan krisis moral semakin dalam akibat ketidakseimbangan orientasi kurikulum yang berbasis kognitif semata. Oleh karena itu, rekonstruksi kebijakan PAI tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan manajerial yang menyeluruh dan sistemik.

### **3.2. Kelemahan Manajerial dalam Implementasi Kebijakan Pembelajaran PAI**

Implementasi kebijakan pembelajaran PAI di lapangan tidak hanya ditentukan oleh guru di kelas, melainkan juga oleh tata kelola manajerial institusi pendidikan secara makro (Pujianti et al., 2025; Hidayah et al., 2024). Berdasarkan analisis komparatif terhadap berbagai sumber, terdapat empat kelemahan manajerial krusial yang dapat dikategorisasi berdasarkan fungsi manajemen Pendidikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dirumuskan dalam kajian teori manajemen pendidikan Islam (Sakarina et al., 2022).

Pertama, hambatan kuantitas, kualitas, dan linieritas sumber daya manusia. Ihsan dkk. (2025) dan Muhammad dkk. (2022) secara konsisten menemukan bahwa banyak institusi pendidikan di berbagai wilayah Indonesia menghadapi kekurangan guru PAI tetap yang signifikan. Data Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa kekurangan guru PAI pada jenjang sekolah dasar dan menengah masih mencapai puluhan ribu di seluruh Indonesia. Kondisi ini diperparah ketika lembaga terpaksa merekrut pengajar tanpa latar belakang pendidikan yang linier, sehingga mereka kurang cakap dalam mengaplikasikan pendekatan pedagogis yang efektif (Sakarina et al., 2022). Dari perspektif manajemen, persoalan ini berakar pada lemahnya fungsi perencanaan dan pengorganisasian sumber daya manusia di tingkat kelembagaan.

Kedua, rendahnya kapasitas manajemen lembaga dalam transformasi teknologi digital. Koswara dan Wigati (2026) serta Azhari dan Aurannisa (2026) menunjukkan bahwa ketidakmampuan pimpinan lembaga pendidikan dalam memfasilitasi transformasi digital merupakan salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan pembelajaran PAI kontemporer. Pihak manajemen institusi masih cenderung mempertahankan metode konvensional-tradisional dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi atau media interaktif berbasis digital. Ketiadaan inovasi digital dari sisi manajerial ini melahirkan kesenjangan yang lebar antara kebutuhan generasi muda dengan pola pengajaran institusi, sehingga menurunkan daya tarik serta motivasi belajar keagamaan peserta didik.

Ketiga, lemahnya sinergi interpersonal dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Hidayah dkk. (2024) dan Sakolan (2020) menjelaskan bahwa kebijakan pembelajaran PAI tidak akan berjalan efektif jika diisolasi hanya pada ranah guru PAI semata tanpa keterlibatan aktif ekosistem sekitarnya. Kelemahan manajemen sekolah tercermin dari gagalnya membangun komunikasi dua arah dan sinergitas yang kuat antara guru PAI, kepala sekolah, orang tua, serta masyarakat. Pola operasional yang cenderung tertutup ini membuat pembelajaran PAI berjalan tanpa dukungan penguatan nilai-nilai keagamaan dari lingkungan keluarga, sehingga menghambat efektivitas kebijakan pembentukan karakter.

Keempat, lemahnya perencanaan strategis dan pemetaan kebutuhan makro. Salamun dan Sauri (2023) serta Habibi (2022) menemukan bahwa banyak institusi pendidikan mengimplementasikan kebijakan pembelajaran PAI secara rutin tanpa disertai analisis kebutuhan (*need assessment*) jangka panjang yang mendalam. Manajemen sekolah cenderung terjebak dalam pemenuhan aspek administratif formal seperti sekadar memenuhi jam pelajaran minimum dalam kurikulum, daripada merumuskan visi strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai PAI ke dalam budaya sekolah secara menyeluruh. Akibatnya, kebijakan pembelajaran PAI berjalan tanpa arah strategis yang jelas dan terpisah dari sistem tata kelola kelembagaan secara utuh.

Keempat kelemahan manajerial tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperlemah satu sama lain: keterbatasan SDM memperburuk rendahnya kapasitas digital; lemahnya kolaborasi stakeholder memperparah absennya perencanaan strategis. Hal ini menegaskan bahwa rekonstruksi kebijakan PAI harus bersifat sistemik, mengatasi keempat dimensi tersebut secara simultan dan terintegratif.

### **3.3. Model Rekonstruksi Manajerial Implementasi Kebijakan Pembelajaran dalam Perspektif Manajemen Pendidikan Islam**

Berdasarkan analisis terhadap problematika dan kelemahan manajerial yang teridentifikasi, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi kebijakan pembelajaran PAI yang berbasis empat prinsip manajemen pendidikan Islam. Berbeda dari model manajemen pendidikan Islam yang telah ada yang umumnya berfokus pada salah satu aspek seperti kepemimpinan kepala sekolah (Munawaroh & Muhaimin, 2019), pengembangan kurikulum (Habibi, 2022), atau peningkatan kompetensi guru (Sakarina et al., 2022) model yang ditawarkan dalam penelitian ini mengintegrasikan keempat dimensi secara holistik dalam satu kerangka rekonstruksi yang dapat diterapkan pada level kebijakan institusional. Keempat prinsip yang menjadi fondasi model ini adalah: (1) *itqan* (profesionalitas dan akurasi dalam pengelolaan SDM); (2) *syura* (musyawarah dan kolaborasi antar pemangku kepentingan); (3) *taghyir* (kapasitas adaptasi terhadap perubahan digital dan sosial); dan (4) *tashwir* (perencanaan strategis berbasis kebutuhan). Dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, keempat prinsip ini bukan hanya nilai normatif, melainkan panduan operasional yang dapat diimplementasikan dalam setiap fungsi manajemen pendidikan (Hidayah et al., 2024; Ihsan et al., 2025).

Rekonstruksi pertama, penguatan manajemen sumber daya manusia berbasis prinsip *itqan*. Sebagai respons atas hambatan kuantitas, kualitas, dan linieritas tenaga pendidik PAI, lembaga pendidikan perlu membangun sistem rekrutmen yang mengutamakan kesesuaian kompetensi akademik dan keahlian dengan mata pelajaran yang diampu. Upaya ini harus diikuti dengan pengembangan profesional berkelanjutan melalui pelatihan, workshop,

sertifikasi, komunitas belajar, dan pendampingan akademik yang terstruktur. Muhammad dkk. (2022) dan Sakarina dkk. (2022) membuktikan bahwa manajemen strategis yang berorientasi pada kompetensi mampu meningkatkan kualitas implementasi pembelajaran PAI secara signifikan. Yang membedakan model ini dari rekomendasi generik pengembangan SDM adalah penekanannya pada integrasi antara kompetensi profesional modern (pedagogik, literasi digital) dan kompetensi normatif Islam (keteladanan, amanah), sehingga guru PAI berkembang tidak hanya sebagai profesional teknis tetapi juga sebagai pendidik karakter.

Rekonstruksi kedua, penguatan transformasi digital berdasarkan prinsip taghyir. Manajemen sekolah perlu mengembangkan kebijakan konkret yang mendukung integrasi teknologi dalam pembelajaran, mencakup: (a) penyediaan infrastruktur digital yang memadai melalui anggaran prioritas; (b) peningkatan kompetensi teknologi guru melalui program pelatihan yang terukur dan berkelanjutan; (c) pengembangan platform dan media pembelajaran interaktif yang mengintegrasikan konten keislaman; serta (d) evaluasi berkala terhadap efektivitas penggunaan teknologi dalam capaian tujuan pembelajaran PAI. Koswara dan Wigati (2026) menunjukkan bahwa transformasi digital yang berhasil dalam pendidikan Islam mensyaratkan perubahan budaya organisasi dari orientasi konvensional menuju sistem pembelajaran yang fleksibel, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik sebuah perubahan yang hanya dapat diwujudkan melalui kebijakan manajerial yang konsisten dan terencana.

Rekonstruksi ketiga, penguatan sinergi stakeholder berbasis prinsip syura. Pembelajaran PAI tidak dapat berjalan secara optimal apabila hanya menjadi tanggung jawab guru PAI semata. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu membangun komunikasi intensif dan berkelanjutan dengan orang tua serta masyarakat melalui mekanisme konkret seperti: forum kemitraan sekolah-orang tua yang terstruktur, kegiatan keagamaan bersama antara sekolah dan komunitas, serta program pembinaan karakter berbasis kolaborasi multi stakeholder. Hidayah dkk. (2024) membuktikan bahwa penguatan sinergi stakeholder mampu menciptakan kesinambungan pendidikan nilai antara lingkungan sekolah dan keluarga, sehingga proses internalisasi ajaran Islam berlangsung secara lebih efektif. Model ini memperluas konsep syura dari sekadar musyawarah internal lembaga menjadi mekanisme kolaborasi tata kelola pendidikan yang melibatkan seluruh ekosistem pendidikan.

Rekonstruksi keempat, penguatan perencanaan strategis berbasis prinsip *tashwir*. Lembaga pendidikan perlu melakukan *need assessment* secara berkala untuk mengidentifikasi perkembangan peserta didik, tantangan sosial-keagamaan, perkembangan teknologi, serta kebutuhan kompetensi masa depan. Hasil pemetaan ini harus menjadi dasar penyusunan visi, misi, program, dan indikator keberhasilan pembelajaran PAI yang terintegrasi dengan budaya sekolah. Salamun dan Sauri (2023) menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan yang sistematis merupakan kunci dalam pengembangan kebijakan PAI yang adaptif. Sistem evaluasi yang dikembangkan perlu mencakup tidak hanya capaian kognitif, tetapi juga aspek afektif dan perilaku keagamaan sebuah terobosan evaluatif yang membedakan model ini dari pendekatan asesmen konvensional yang masih dominan. Tabel 1 menyajikan ringkasan model rekonstruksi yang menghubungkan aspek kelemahan manajerial, indikator permasalahan, prinsip manajemen pendidikan Islam yang relevan, dan rekomendasi rekonstruksi kebijakan.

**Tabel 1.** Model Rekonstruksi Manajerial Kebijakan Pembelajaran PAI Berbasis Prinsip Manajemen Pendidikan Islam

Aspek Kelemahan Manajerial	Indikator Permasalahan	Prinsip MPI yang Relevan	Rekomendasi Rekonstruksi
Kuantitas, Kualitas & Linieritas SDM	Kekurangan guru PAI tetap; rekrutmen tidak linier; kompetensi pedagogik rendah	Itqan (profesionalitas); Amanah (tanggungjawab)	Rekrutmen berbasis kompetensi; program pelatihan berkelanjutan; komunitas belajar guru
Adaptasi Teknologi Digital	Dominasi metode konvensional; absennya media interaktif; gap generasi digital	Taghyir (adaptasi perubahan); Ishlah (perbaikan berkesinambungan)	Kebijakan integrasi teknologi; pengembangan bahan ajar digital; peningkatan kompetensi digital guru
Sinergi Antar Stakeholder	Minimnya komunikasi sekolah-orang tua; isolasi peran guru PAI; absennya kemitraan komunitas	Syura (musyawarah); Ta'awun (kerja sama); Ukhuwwah (persaudaraan)	Forum kemitraan multistakeholder; program kolaborasi orang tua-sekolah; kegiatan keagamaan bersama
Perencanaan Strategis & Need Assessment	Absennya analisis kebutuhan jangka panjang; orientasi administratif-formal semata	Tashwir (perencanaan matang); Taqwim (evaluasi sistematis)	Need assessment berkala; penyusunan visi PAI berbasis data; evaluasi capaian afektif-kognitif

Model rekonstruksi empat prinsip ini secara keseluruhan membentuk satu kerangka integratif yang berbeda dari pendekatan-pendekatan sebelumnya. Kebaruannya terletak pada tiga hal: (1) integrasi nilai normatif Islam dengan fungsi manajerial modern dalam satu model yang operasional; (2) pendekatan sistemik yang mengatasi empat dimensi kelemahan secara simultan, bukan parsial; dan (3) penekanan pada aspek evaluatif yang mencakup dimensi afektif dan konatif tidak hanya kognitif sebagai ukuran keberhasilan implementasi kebijakan PAI.

### 3.4. Implikasi Hasil Penelitian terhadap Pengembangan Kebijakan PAI

Berdasarkan model rekonstruksi yang dirumuskan, terdapat empat implikasi strategis bagi pengembangan kebijakan PAI yang perlu dibedakan antara implikasi teoretis dan implikasi praktisnya. Pertama, implikasi teoretis terhadap pengembangan ilmu manajemen pendidikan Islam. Secara teoretis, penelitian ini memperluas diskursus manajemen pendidikan Islam dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip nilai Islam ke dalam kerangka analisis kebijakan pendidikan. Model yang dihasilkan menawarkan perspektif baru bahwa prinsip-prinsip Islam seperti *itqan*, *syura*, *taghyir*, dan *tashwir* bukan hanya relevan sebagai nilai moral, tetapi dapat difungsikan sebagai kategori analitis dalam studi kebijakan pendidikan sebuah kontribusi teoretis yang belum secara eksplisit dikembangkan dalam literatur sebelumnya (Hidayah et al., 2024; Salamun & Sauri, 2023).

Kedua, implikasi praktis terhadap penguatan kebijakan pengembangan sumber daya manusia PAI. Secara praktis, temuan penelitian ini berimplikasi pada perlunya revisi kebijakan rekrutmen dan pengembangan kompetensi guru PAI yang tidak hanya mencakup aspek pedagogik dan profesional, tetapi juga literasi digital dan keteladanan nilai Islam. Kebijakan pengembangan SDM yang berbasis prinsip *itqan* mensyaratkan adanya sistem evaluasi kinerja guru yang mengukur tidak hanya capaian akademik peserta didik, tetapi juga perkembangan karakter dan perilaku keagamaan (Koswara & Wigati, 2026; Apriyani et al., 2025).

Ketiga, implikasi praktis terhadap penguatan kebijakan kolaborasi dan kemitraan pendidikan Islam. Rekonstruksi berbasis prinsip *syura* berimplikasi pada perlunya kebijakan kelembagaan yang secara formal mengatur mekanisme kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas dalam implementasi pembelajaran PAI. Dalam perspektif pendidikan Islam, proses pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan seluruh unsur sosial; oleh karena itu, kebijakan kemitraan perlu distrukturisasi ke dalam program-program yang terukur dan dapat dievaluasi keberlanjutannya (Badrudin, 2020; Hidayah et al., 2024).

Keempat, implikasi praktis terhadap penguatan kebijakan perencanaan dan evaluasi pembelajaran PAI. Rekonstruksi berbasis prinsip *tashwir* berimplikasi pada perlunya transformasi sistem perencanaan kebijakan PAI dari pendekatan administratif-formal menuju pendekatan strategis berbasis data. Lebih jauh, sistem evaluasi pembelajaran PAI perlu dikembangkan secara komprehensif dengan tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan konatif sebuah implikasi praktis yang secara langsung dapat diterapkan oleh kepala sekolah dan pengawas dalam penyusunan program kerja pembelajaran PAI (Salamun & Sauri, 2023; Koswara & Wigati, 2026).

#### 4. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pembelajaran PAI masih menghadapi berbagai problematika yang saling terkait, meliputi: (1) rendahnya efektivitas metode pembelajaran; (2) hambatan implementasi kebijakan digitalisasi; (3) ketidakresponsifan kurikulum terhadap tantangan globalisasi; (4) ancaman krisis moral dan radikalisme; serta (5) ketidakseimbangan orientasi akademik dan humanistik. Problematika tersebut bersumber pada empat kelemahan manajerial utama, yaitu: keterbatasan kuantitas, kualitas, dan linieritas sumber daya manusia; rendahnya kapasitas adaptasi digital kelembagaan; lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan; dan ketiadaan perencanaan strategis berbasis kebutuhan.

Berdasarkan perspektif manajemen pendidikan Islam, penelitian ini merumuskan model rekonstruksi kebijakan pembelajaran PAI yang terdiri atas empat komponen integratif: penguatan SDM berbasis prinsip *itqan*, transformasi digital berbasis prinsip *taghyir*, penguatan sinergi stakeholder berbasis prinsip *syura*, dan perencanaan strategis berbasis prinsip *tashwir*. Model ini menawarkan kebaruan konseptual dibandingkan kajian sebelumnya karena mengintegrasikan nilai normatif Islam dengan fungsi manajemen modern dalam satu kerangka sistemik yang dapat dioperasionalkan di tingkat kelembagaan. Kontribusi utama penelitian ini adalah penyediaan model rekonstruksi yang tidak hanya normatif-deskriptif, tetapi juga operasional transformatif yakni dapat dijadikan acuan oleh pengambil kebijakan pendidikan, kepala madrasah/sekolah, dan pengembang

kurikulum dalam merekonstruksi tata kelola pembelajaran PAI yang adaptif, integratif, dan berorientasi mutu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2024). Manajemen strategi integrasi ilmu keislaman dalam transformasi dokumen kurikulum PTKIS. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 13(1), 45–58.
- Apriyani, H., Yanti, Y., Muzzeki, M., Ajir, I. C., Anwar, C., Anwar, S., & Dacholfany, M. I. (2025). Strategi manajemen guru PAI dalam menghadapi transformasi digital: Tantangan dan sistem pendidikan Islam di Indonesia. *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 183–187.
- Arifin, M., Putri, A., & Dayem, F. G. A. (2026). Rekonstruksi kurikulum berbasis nilai sebagai solusi atas krisis humanisme dalam pendidikan modern. *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3(2), 327–336.
- Azhari, W. P., & Aurannisa, N. (2026). Analisis kebijakan pendidikan Islam dalam RPJMN 2025–2029 perspektif William N. Dunn. *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan*, 12(1), 106–127.
- Badrudin. (2020). *Manajemen strategis pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah umum*. Remaja Rosdakarya.
- Bush, T., & Middlewood, D. (2013). *Leading and managing people in education* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Daft, R. L. (2016). *Management* (13th ed.). Cengage Learning.
- Habibi, M. M. (2022). Interpretasi dan implikasi MBKM terhadap pengembangan kurikulum program studi Pendidikan Agama Islam UII. *El-Tarbawi*, 15(2), 305–334.
- Hanafi, Y., Ikhsan, M. A., Saefi, M., Diyana, T. N., & Arifianto, M. L. (2021). *Pendidikan agama Islam di masa pandemi Covid-19: Tantangan dan respon*. Delta Pijar Khatulistiwa.
- Hidayah, N., Ridwan, A., & Azis, A. (2024). Tantangan dan solusi dalam implementasi manajemen pendidikan Islam di era modern. *Jurnal Al-Fatih*, 7(2), 209–228.
- Ihsan, F. A., Lestari, A. D., Ratih, I. S., & Fitri, F. (2025). Kelemahan dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah Indonesia: Penyebab dan solusi. *Mesada: Journal of Innovative Research*, 2(1), 262–274.
- Koswara, A., & Wigati, I. (2026). Digital transformation in Islamic religious education: Opportunities, challenges, and strategic solutions. *Sustainable: Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 9(2).
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, F. R., Nurjaman, U., Sukandar, A., Khori, A., & Lestere, L. (2022). Strategic management in improving the quality of Islamic religious education learning. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(3), 318–329.
- Munawaroh, M., & Muhaimin, A. (2019). Korelasi antara perencanaan pembelajaran dengan hasil belajar di SMPI Baburrohman Mojokerto 2017–2018. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 310–327.

- Nurhasanah. (2021). Integrasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran PAI. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 49–67.
- Oktafiani, I. S., & Muhtarom, Y. (2022). Pendidikan karakter Islam: Internalisasi nilai Pancasila dalam kepribadian siswa pasca pandemi Covid-19. *HEUTAGOGIA: Journal of Islamic Education*, 2(2), 189–205.
- Pujianti, E., Dianzah, R., Tuan, M., Bara, M., Cendana, M., & Yudistera, L. (2025). Rekonstruksi kurikulum PAI dengan harmonisasi antara tradisi keilmuan Islam dan tuntutan globalisasi. *Ambarsa: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 171–182.
- Sakarina, S., Pratiwi, R., Surahman, S., Cakranegara, P. A., & Arifin, A. (2022). Strategic management of Islamic education: Revealing the challenges of professionalism. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(3), 778–788.
- Sakolan, S. (2020). Perencanaan strategis pendidikan agama Islam. *Indonesian Journal of Islamic Educational Management*, 3(2), 129–134.
- Salamun, A., & Sauri, S. (2023). Isu dan masalah dalam analisis evaluasi dan pengembangan kebijakan pendidikan agama Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(01).
- Sergiovanni, T. J. (2009). *The principalship: A reflective practice perspective* (6th ed.). Pearson.
- Sujanto, L. F., Kurniawan, Z., & Holik, A. (2023). Peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kecakapan abad ke-21 melalui literasi digital. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 6534–6540.
- Sutrisno, S. A., & Arifi, A. (2025). Politik kebijakan pendidikan agama Islam era reformasi dalam implementasi UU No. 20 Tahun 2003. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(03), 330–351.
- Warsiyah, W., Athoillah, S., & Soqiluqi, A. (2023). Implikasi Kurikulum Merdeka pada pengembangan instrumen penilaian hasil belajar PAI. *Jurnal Progress: Wahana Kreativitas dan Intelektualitas*, 11(1), 1–16.
- Yulia, Y., Munir, M., & Nurlaila, N. (2025). Problematika dan kebijakan pendidikan Islam kontemporer di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 6(2), 381–391.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.